

CO-MANAGEMENT DALAM PENELOLAAN SAMPAH DI TPST DESA MUYOAGUNG KECAMATAN DAU KABUPATEN MALANG

Perwari Indah¹ Ameilia Ning Ayunisa² Dilah Saras Ayu³
Universitas Muhammadiyah Malang^{1,2,3}

Kata Kunci : CO-Management, Peran, Konflik.

Correspondensi Author
galaxypixe@gmail.com¹

Abstrak : Konsep Co-Management merupakan alat yang diharapkan dapat meminimalisir terjadinya permasalahan antar serta konflik yang dapat terjadi di pengelolaan TPST Mulyo Agung. Co-Management merupakan salah satu pendekatan pengelolaan yang memberi peran besar bagi partisipasi masyarakat dengan fasilitasi oleh pemerintah dalam TPST Mulyo Agung yang melibatkan dari Pemerintah Desa, Pemerintah Pusat berupa Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang serta kelompok swadaya masyarakat desa Mulyo Agung. Dalam pengelolaan Co-Management sangatlah efisien digunakan dalam program TPST Mulyo Agung walaupun sangat efisien namun konflik pernah terjadi pada awal pengoprasian kegiatan kerja TPST Mulyo Agung, dimana konflik datang dipicu dari awal pembangunan TPST. Namun hal ini dapat diatasi dengan pembaruan dan pengembangan program pemilihan dan pengelolaan sampah. Dalam sytem Co-Management memang masih sering di temui konflik. Penelitian ini menggunakan metode penelitan kualitatif dengan cara observasi dan wawancara

PENDAHULUAN

Pengelolaan sampah sejalan dengan perkembangan kota telah menjadi agenda permasalahan utama yang dihadapi oleh hampir seluruh kawasan di Indonesia tidak hanya perkotaan tetapi juga daerah-daerah semi perkotaan seperti wilayah Desa Mulyoagung Kabupaten Malang merupakan kawasan semi perkotaan yang menjadi tempat tujuan bermukimnya pendatang.

Desa Mulyoagung merupakan sebuah desa di wilayah Kecamatan Dau Kabupaten Malang yang terletak di antara Kota Malang dan Kota Batu. Berdasarkan letak Desa Mulyoagung yang berada di antara Kota Batu dan Kota Malang, Desa Mulyoagung menjadi salah satu tujuan para pendatang untuk bermukim sehingga peningkatan sampah terutama sampah domestik pun tidak dapat dihindari. Penelitian ini berusaha menggambarkan pembangunan berwawasan lingkungan yang dilakukan oleh Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Desa Mulyoagung dan perubahan sosial masyarakat terkait isu lingkungan sampah sebagai dampak dari pertumbuhan penduduk dan aktivitas pembangunan, khususnya pada masyarakat Desa Mulyoagung

Meningkatnya aktivitas masyarakat seiring dengan laju pertumbuhan ekonomi yang kemudian diikuti dengan tingginya laju pertumbuhan penduduk akan semakin terasa dampaknya terhadap lingkungan. Penurunan kualitas lingkungan secara terus menerus menyudutkan masyarakat pada permasalahan degradasi lingkungan. Salah satu

permasalahan lingkungan yang berkaitan erat dengan pelayanan publik di wilayah semi perkotaan adalah pengolahan sampah. Volume sampah yang meningkat dengan laju pertumbuhan yang cepatakan menghadapkan pada permasalahan kebutuhan lahan pembuangan sampah, serta semakin tingginya biaya pengolahan sampah dan biaya-biaya lingkungan.

Permasalahan sampah yang terjadi di kawasan semi perkotaan perlu ditanggulangi melalui sebuah sarana pengolahan sampah. Dalam pengolahan sampah terdapat dua aspek, yaitu aspek teknis dan nonteknis. Teknis terdiri atas pewardahan, pengumpulan sampah, pengangkutan sampah, pembuangan akhir, daur ulang, dan pengomposan. Sedangkan aspek nonteknis terdiri atas keuangan, institusi dan instansi pemerintah, partisipasi masyarakat, partisipasi pihak swasta, pungutan retribusi dan peraturan pemerintah (Nadisa dkk. 2009). Salah satu bentuk usaha penanganan masalah peningkatan volume sampah di Desa Mulyoagung dilakukan melalui Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST).

Resiko sosial dari pengelolaan sampah yang tidak tepat yakni dapat memunculkan persoalan-persoalan dilematis. Secara umum penumpukan sampah dapat menyebabkan banyak bencana mulai dari pencemaran lingkungan tanah, air dan udara yang sudah terjadi dimana-mana. Permasalahan pengelolaan sampah tidak akan pernah dapat diselesaikan jika hanya bertumpu pada pemerintah saja tanpa ada keterlibatan dari masyarakat sebagai sumber penghasil sampah itu sendiri.

Kemudian yang sering menjadi persoalan yakni pengelolaan sampah di mana kurang mengakomodir kepentingan semua *stakeholders*. Masyarakat selalu merasa bahwa dirinya tidak memiliki kewajiban dari setiap pencemaran dan penumpukan sampah dan tidak memiliki kewajiban untuk ikut serta dalam pengelolaan sampah, ketika peran ini dibenturkan kepada pemerintah dengan dinas yang bergerak di isu lingkungan makan akan rentan memunculkan konflik sosial, terlebih dewasa ini sampah memiliki nilai intrinsik tidak hanya terkait dengan satu nilai. Sampah memiliki nilai sosial, ekonomi, kultural dan lingkungan.

Tidak heran di Desa Mulyoagung ini tercatat pernah terjadi kasus konflik terkait awal pembangunan dan pengoperasian TPST (Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu). Konflik disebabkan karena warga yang rumahnya berdekata dengan lokasi TPST (Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu) merasa kurang nyaman karena bau yang ditimbulkan dari penumpukan sampah yang mana hal ini terjadi karena proses pemilahan sampah yang lambat akibat dari kurangnya pegawai yang menyebabkan proses pemilahan lambat dan menyebabkan penumpukan sampah di TPST dalam jangka waktu lama dan mengalami pembusikan. Hal ini juga merambah pada peningkatan jumlah lalat yang berkeliaran ke rumah-rumah warga akibat dari penumpukan tersebut. Hal tersebut menyebabkan terjadinya konflik antara warga sekitar lokasi TPST dengan pihak pengelola TPST. (Apsari dkk. 2016)

Pengelolaan sampah kota di Indonesia menjadi masalah aktual seiring dengan semakin meningkatnya tingkat pertumbuhan penduduk yang berdampak pada semakin banyak jumlah sampah yang dihasilkan. Beberapa penelitian menganalisis penyebab masalah-masalah yang terjadi pada pengelolaan sampah di Indonesia (Chaerul, 2007) menganalisis penyebab permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan sampah di Indonesia, diantaranya kurangnya dasar hukum yang tegas, tempat pembuangan sampah yang tidak memadai, kurangnya usaha dalam melakukan pengomposan dan kurangnya TPA dengan sistem yang tepat. (Kardono, 2007) mengataan bahwa permasalahan pengelolaan sampah di Indonesia dilihat dari beberapa indikator berikut, yaitu tingginya

jumlah sampah yang dihasilkan, tingkat pelayanan pengelolaan sampah yang masih rendah, tempat pembuangan akhir yang terbatas jumlahnya, institusi pengelolaan sampah dan masalah biaya.

Pada konteks inilah, *co-management* mampu mengurangi potensi-potensi konflik sosial tersebut, sebab ia merupakan kolaborasi semua aktor atau *stakeholders*, baik dari komunitas sekitar, pemerintah maupun pelaku bisnis (swasta). Semua pihak sama-sama menyadari *joint management* ini. Latar belakang yang tidak sama, baik dari agen negara, pelaku bisnis maupun masyarakat dekat sumber daya alam akan mengharuskan pembagian (*sharing*) antara negara dengan masyarakat lokal, baik itu menyangkut pembagian kekuasaan, tugas, resiko, tanggung jawab, keberhasilan dan kegagalan.

konsep *co-management* merupakan alat yang diharapkan dapat meminimalisir terjadinya permasalahan antar *stakeholder*. Rachmad (2010) menjelaskan bahwa terdapat unsur yang sangat membantu keberhasilan pencapaian tujuan dari konteks *comanagement*. Delapan karakteristik / unsur tersebut meliputi: 1) Komunikasi terbuka. 2) Partisipasi luas. 3) Berfikir yang tidak dibatasi. 4) Konflik konstruktif. 5) Struktur demokratis. 6) Sumber-sumber pengetahuan. 7) Keterlibatan luas. 8) Fasilitasi.

Co-management memiliki unsur-unsur pokok, sebagai berikut: 1) Pihak-pihak yang terlibat, tidak hanya satu individu atau kelompok, tetapi lebih dari satu dengan beragam latar belakang kepentingan untuk kolaborasi. 2) Pengambilan keputusan, pembagian hasil dan menanggung resiko bersama-sama. 3) Sifat hubungan pihak-pihak yang terlibat sangat bervariasi antara hubungan formal dengan hubungan informal (Susilo, 2017)

Kelebihan *co-management* dibanding model pengelolaan berbasis komunitas dan pengelolaan berbasis negara. Kelemahan pengelolaan berbasis komunitas yakni keterbatasan kapital fisik, kapital sosial dan manusia. Selain itu, lemahnya dukungan elit dan pemerintah lokal. Sementara itu, pengelolaan berbasis negara karena gagal merefleksikan realitas-realitas lokal pada komunitas yang menjadi target. Kasus di Danau Nairasha, Kenya bahkan pendekatan kedua ini menghasilkan kerusakan lingkungan yang parah (Isyaku, Usman, Murtala Chindo dan Mukhtar Ibrahim, 2011).

Keberhasilan *co-management* akan menghasilkan pertukaran sumber daya, pengurangan biaya dan resiko, mengatasi ketidakpercayaan, inefisiensi dan pencegahan konflik (Sekhar, Udaya Nagothu, 2006). Selain itu, pada konteks pengelolaan sumber daya mampu menciptakan tiga hal, yaitu pertama, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya keberlanjutan sumber daya alam yang menunjang kehidupan. Kedua, meningkatnya partisipasi masyarakat dalam mengelola sumber daya secara terpadu. Ketiga, meningkatnya kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjamin adanya kelestarian dan keberlanjutan ekologis (Hanif, Hasrul, 2008)

Beberapa decade terakhir isu mengenai pencemaran lingkungan yang dikarenakan sampah sudah mulai dibahas dan dari penelitian yang berada di desa Mulyoagung kecamatan Dau Kabupaten Malang ini saya menemukan adanya pengelolaan sampah yang berbasis masyarakat yang mana peran pemerintah, masyarakat dan organisasi sekitar saling bekerja sama dalam upaya penanggulangan bencana pencemaran lingkungan ini. Berikut ini adalah beberapa pembahasan terkait penelitian terdahulu yang berlokasi di Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) desa Mulyoagung.

Menurut penelitian Devi Hernawati, yang membahas tentang partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah, ia menyatakan "Masyarakat Desa Mulyoagung dalam memelihara TPST sangat baik. Hal ini dapat dilihat dari kesukarelaan atau kesadaran masyarakat untuk membayar iuran guna membiayai operasional TPST agar tetap berjalan dengan baik, hal ini masuk kedalam partisipasi secara uang (*money*)

Participation). Karena TPST Desa Mulyoagung merupakan hasil swadaya dari masyarakat maka peran masyarakat dalam membayar iuran sangatlah penting agar TPST tetap bias berjalan dan berkembang.

Sedangkan Boy Shandi Sahputra dalam penelitiannya mengkaitkan kedalam pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan di TPST desa Mulyoagung ini yang menemukan bahwa proses pemberdayaan masyarakat dalam proses tersebut berjalan dengan baik ini dapat dibuktikan dari adanya keikutsertaan masyarakat dalam proses pengelolaan baik sebagai tenaga yang menjadi pekerja dalam usaha ini ataupun menjadi masyarakat konsumen yang menggunakan fasilitas tersebut.

Pembahasan oleh peneliti Annisa Dwi Apsari yang mana dapat menjadi lanjutan dari kedua peneliti sebelumnya, pada hasil penelitian ini dia membahas tema tentang “Perubahan Sosial Masyarakat” yang terjadi sebelum dan setelah berdirinya dan akibat dari pembangunan TPST tersebut. Beberapa perubahan yang terjadi di masyarakat yang dapat dilihat saat ini adanya peningkatan angkatan kerja yang terserap akibat dari pembangunan TPST ini, yang mana telah membuka dan menyediakan lapangan pekerjaan bagi warga masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan, yang mana rata-rata di antaramereka adalah warga asli ataupun mereka yang tinggal di kawasan desa Mulyoagung ini. Pertumbuhan ini menyebabkan perubahan sosial masyarakat yang semula pengangguran kini telah memiliki pekerjaan. Didalam penelitiannya dia juga mendapati konflik yang ada di masyarakat terhadap pembangunan dan pengoperasian kegiatan TPST ini, yaitu adanya pencemaran udara dari bau busuk yang ditimbulkan dari penumpukan sampah, dan juga meningkatnya populasi lalat yang datang dari pembusukan sampah.

Pengembang penelitian keempat ini yang ditulis oleh Yulia Nurul Ichrom, yang membahas tema tentang manajemen tempat pengelolaan sampah, ia urutan dari setiap pelaksanaan kegiatan yang ada di TPST ini mulai dari Perencanaan, Pengorganisasian, pengadaan tenaga kerja, pemberian bimbingan/arahan, pengkoordinasian, hingga pada pelaporan kegiatan pelaksanaan yang ada di TPST ini. Semua kegiatan dianggap berjalan cukup baik namun kekurangan ditemukan dalam proses pelaporan yang mana kegiatan ini jarang dilakukan oleh pihak pengelola TPST dan juga jika pun hal ini dilaksanakan namun tidak adanya tanggapan atau evaluasi dari pusat yang mana dapat menjadi pahan koreksi kinerja dari TPST itu sendiri.

Dari hasil penelitian terdahulu yang dijelaskan di atas mereka telah banyak menjelaskan tentang pengelolaan, pemberdayaan dan pengaruhnya bagi kehidupan masyarakat sekitar yang mana sejauh ini di anggap memiliki dampak positif maka dari itu pada penelitian ini kami ingin mengambil poin pembahasan tentang karakter pengelolaan yang berbasis *Co-management* yang mana di dalam keempat hasil penelitian di atas masalah ini belum di jabarkan secara jelas yang mana pada hasil temuan yang kami dapatkan terdapat beberapa golongan berbeda yang terlibat dalam pembentukan TPST di Mulyoagung ini diantaranya adalah Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang , PKK, Linmas, Tokoh Masyarakat, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD), Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan juga Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM).

Dengan menggunakan konsep *co-management* yang menurut penjelasan Feyerabend, dkk menyatakan bahwa *co-management* merupakan kemitraan di mana ada dua atau lebih aktor-aktor yang bernegosiasi, bersepakat, menggaransi dan melaksanakan pembagian yang *fair* atas fungsi-fungsi, keuntungan, dan tanggung jawab pengelolaan pada wilayah atau seperangkat sumber daya alam tertentu.

Maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mencari tahu hubungan yang terjalin serta konflik apa yang terjadi pada awal pembentukan dan pelaksanaan dari pihak-

pihak yang terkait dengan perencanaan pembentukan hingga pada pengelolaan dan pengoperasian Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) di Desa Mulyoagung, yang dapat meliputi bentuk kerjasama, dan juga kesepakatan yang telah mereka buat dalam perencanaan pembangunan ini serta peran serta dan partisipasi yang mereka lakukan dengan dampak yang akan diterima oleh masyarakat sekitar baik sebagai pekerja ataupun sebagai konsumen dari TPST ini.

METODE PELAKSANAAN KEGIATAN

Penelitian dilakukan di Desa Mulyoagung, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bersifat naturalistik karena dilakukan pada kondisi yang alamiah. Melalui penelitian yang bersifat kualitatif, peneliti berusaha mendapatkan data tentang perubahan sosial masyarakat Desa Mulyoagung akibat pembangunan berwawasan lingkungan melalui Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST). Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dalam penelitian ini dan peneliti menggunakan teknik wawancara.

Adapun subjek penelitian yaitu semua aktor yang terlibat pada *co-management*, seperti pada level desa, meliputi: Kepala Desa, Sekretaris desa, LPMD, Ketua BPD, Ketua dan Ketua Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM). Sementara itu, dari level kota terdapat, Kantor Lingkungan Hidup, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, NGO (*Non Governmental Organization*) yang bergerak pada isu lingkungan. Sedangkan, teknik pengumpulan data meliputi wawancara mendalam dan observasi, baik pelaku *co-management* di level dusun maupun yang ada di level desa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dampak Lingkungan Sampah

Salah satu permasalahan yang ditimbulkan dari sampah adalah menurunnya estetika di sekitar tempat pembuangan sampah sehingga berpotensi menimbulkan konflik sosial dengan masyarakat yang ada di sekitarnya. Penentangan yang dilakukan masyarakat sekitar pada umumnya berkenaan dengan sebab yang membahayakan kesehatan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA). Penempatan TPA memerlukan lahan yang luas sedangkan lahan di kota besar semakin sempit karena meningkatnya pertambahan penduduk. Seperti yang diungkapkan (Hadi, 2005:47) dampak lingkungan dan sosial yang timbul akibat TPA telah menjadi fenomena umum di kota-kota besar seperti Jakarta (Bantargebang), Surabaya (Kaputi, Sukolilo), Semarang (Jatibarang).

Masalah lingkungan dan sosial yang muncul di TPST Mulyoagung dilihat dari awal pengoperasian kerja dari TPST itu sendiri. Pada periode kerja pertama menurut penjelasan bapak Supadi "*masalah terdapat pada jumlah tenaga kerja yang masih sedikit dan berdampak pada timbunan sampah di TPST*" hal ini memiliki dampak buruk yang mana jika tidak segera di pilah sampah akan menyebabkan penumpukan sampah dan proses pembusukan yang mencemari lingkungan sekitar berupa di udara di sekitar TPST, penduduk merasa tidak nyaman karena adanya bau yang kurang sedap di tambah lagi dengan pencemaran dan pengembangbiakkan lava belatung yang berubah menjadi lalat dan menyebar di sekitar pemukiman penduduk hingga menimbulkan protes.

Co-Management

Co-Management atau pengelolaan bersama merupakan paradigma yang sedang berkembang dengan pesat dalam pengelolaan sumber daya alam dimana Ruang terbuka hijau merupakan lahan konservasi yang perlu pengelolaan bersama (kemitraan) antara pemerintah, masyarakat dan *stakeholder*. *Comanagement* juga dinamakan pengelolaan kolaboratif, pengelolaan partisipatif atau pengelolaan berbasis masyarakat. Pengelolaan partisipatif didasarkan pada tiga bagian utama (Wells, et al., 1992 dalam Bambang, 2006): 1) Semua pemangku kepentingan (*stakeholder*) diberi kesempatan untuk terlibat aktif dalam pengelolaan. Hal ini dimaksudkan untuk menjamin komitmen dan partisipasi mereka dan untuk menampung pengetahuan, aspirasi dan pengalaman mereka dalam pengelolaan; 2) Pembagian peran dan tanggung jawab di dalam pengelolaan berbeda-beda tergantung kondisi khusus dari tiap kawasan. Dalam beberapa kasus, kewenangan lebih banyak pada lembaga masyarakat, pada kasus yang lain kewenangan lebih banyak pada instansi pemerintah; 3) Kerangka kerja pengelolaan tidak hanya untuk tujuan ekologis konservasi, melainkan juga mencakup tujuan-tujuan ekonomi, social dan budaya. Perhatian khusus perlu diberikan terhadap kebutuhan mereka yang tergantung terhadap sumberdaya, keseimbangan dan partisipasi.

Bambang (2006) bahwa penerapan konsep *comanagement* harus melihat terlebih dahulu tanggapan-tanggapan dari *stakeholder* terhadap pengelolaan sumber daya alam. Sehingga ketika respon atau tanggapan sudah dimunculkan, akan dapat diketahui bagaimana konsep kemitraan yang dapat dijalin antar seluruh *stakeholder*. Adanya tanggapan sangat berkaitan dengan keterlibatan *stakeholder*. Dari aspek bentuk pelibatan hasil, kurangnya akses khususnya masyarakat terhadap forum/wadah peran serta yang kondusif diindikasikan oleh beberapa hal seperti, 1) Kurangnya Komitmen Pemerintah untuk melibatkan dan mendayagunakan forum lokal yang ada sebagai wadah pelibatan, sekalipun forum- forum tersebut telah memenuhi syarat dan potensi untuk dilibatkan dalam aktifitas perencanaan dan pengelolaan. 2) Belum adanya kesinambungan dan sifat saling melengkapi antara pelibatan secara perorangan dan kelompok demi mewujudkan keterlibatan aktif masyarakat, dibuktikan dengan prosentase pemahaman masyarakat terhadap pengelolaan sumber daya alam. 3) Belum terpenuhinya representasi keterlibatan masyarakat yang disyaratkan. Hal ini diindikasikan oleh proses seleksi wakil masyarakat secara sepihak oleh pemerintah dalam aktifitas perencanaan dan pengelolaan sumber daya alam. 4) Belum dilakukannya bimbingan teknis/ pendampingan bagi masyarakat karena kurang seriusnya pemerintah mengelola sumber daya.

Tahapan Co-Management

Setelah melakukan perumusan masalah, terkait dengan pengelolaan sampah, salah satu poin krusial dalam hal pengelolaan sampah adalah aspek bagaimana menciptakan pengelolaan sampah secara sistemik yang melibatkan semua pihak. Teori partisipasi mengatakan bahwa sekelompok masyarakat atau komunitas bila dilibatkan dalam membuat suatu keputusan maka mereka akan menjunjung tinggi atau mematuhi keputusan yang telah mereka buat. Hal ini dikarenakan dengan mengajak mereka berbicara, berarti ada penghargaan tersendiri bagi mereka yang diajak dan diberi kepercayaan untuk mengambil keputusan. Diharapkan dengan sistem kemitraan atau istilah populernya co-management akan memberikan tanggung jawab bersama-sama antara masyarakat, pemkot, perguruan tinggi, kelompok, wali masyarakat, dan pihak terkait lainnya. (Sudaryanto, 2005)

Pomeroy dan Williams (1994), mengemukakan bahwa Co-Management (pendekatan kemitraan) adalah pendekatan sharing tanggung jawab antara pihak-pihak terkait seperti pemerintah dan masyarakat dalam mengelola sumber daya atau lingkungan. Co-management bukanlah sebuah model dan teknik regulasi, melainkan sebuah strategi manajemen/pengelolaan yang fleksibel, karena dalam prosesnya memasukkan organisasi formal dan informal pengguna sumberdaya dan stakeholders.

Dalam rangka pengelolaan sampah secara sistemik. Dirumuskan empat tahapan dalam pendekatan Co-Management. Tahapan yang pertama adalah melakukan perumusan masalah. Pada tahapan ini, akan didapatkan apa-apa yang menjadi sumber inti masalah, bentuk usaha dan pemanfaatan yang sudah dilakukan, dan kesenjangan pengelolaan yang terjadi pada suatu daerah kasus. Kedua, melakukan identifikasi stakeholders sampah. Stakeholders dalam pengelolaan sampah pada umumnya adalah pemerintah daerah, paguyuban masyarakat, masyarakat sekitar yang memanfaatkan sumberdaya sampah, pemulung sampah, pengumpul barang bekas, lapak/pedagang pengumpul, industri pengguna, pedagang besar, pengusaha, LSM, akademisi, dan perusahaan daur ulang yang berada disekitar wilayah Tempat Pembuangan Sementara Sampah (TPSS), atau Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPAS), atau Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) dan memanfaatkannya.

Ketiga, melakukan pendekatan berdasarkan analisa atribut, diantaranya: 1) Atribut Fisik, yaitu mengukur kondisi fisik (tingkat pencemaran; kandungan zat berbahaya, dll) dan teknik (daya tampung TPS; luas wilayah; jarak TPS dan pemukiman masyarakat; dll) di wilayah TPSS, TPAS, atau TPST. 2) Atribut Masyarakat, mengukur: umur, tingkat pendidikan, pekerjaan, lama tinggal, aktivitas sosial masyarakat, pemanfaatan, penilaian kondisi wilayah, dan fungsi asli kawasan yang berada di sekitar wilayah TPSS, TPAS, atau TPST. 3) Atribut Institusi, mengukur keanggotaan, kohesi group (homogenitas dan pemahaman masyarakat), aturan, legalitas, koordinasi, dan pendelegasian kekuasaan di wilayah TPSS, TPAS, atau TPST terkait dengan pengelolaan sampah. 4) Atribut Aktor, mengukur peran pemerintah, masyarakat, pengusaha, dan akademisi berdasarkan persepsi stakeholders dalam empat aspek yaitu: perencanaan, pengendalian, pelaksanaan, dan kontrol. 5) Atribut Permintaan dan Penawaran, mengukur derajat komersialisasi pemanfaatan sumberdaya sampah berdasar persepsi masyarakat di sekitar wilayah TPSS, TPAS, atau TPST.

Pendekatan utama yang dilakukan terkait dengan pengelolaan sampah secara sistemik adalah analisis atribut institusi dan aktor. Dari hasil analisis institusi, akan didapatkan suatu penilaian tentang sejauh mana tingkat kemitraan stakeholders, sedangkan hasil dari analisis atribut aktor akan menunjukkan tentang gambaran peran stakeholders selama ini dalam perencanaan, pengendalian, pelaksanaan, dan kontrol terkait dengan pengelolaan sampah. Keempat, melakukan perumusan implementasi kebijakan pengelolaan sampah. Pada tahap ini, dirumuskan kebijakan-kebijakan pengelolaan sampah yang didalamnya mencakup bagaimana seharusnya bentuk tindakan dan partisipasi dan, bagaimana bentuk harmonisasi peran yang tepat diantara stakeholders dalam pengelolaan sampah di suatu wilayah.

Pengelolaan dan Pemanfaatan Sampah

Penyelesaian konflik dan masalah yang terjadi mengenai masalah pencemaran udaran dan juga penyebaran lalat telah diselesaikan oleh para pengelola TPS dengan menambah jumlah pekerja yang bekerja di bagian pemilahan sampah yang berada di zona 1, 2, 3 dan 4. Sampah pertama berada di Zona I, bu Jez mengatakan bahwa "*di zona 1 menjadi tempat proses awal pemilahan sampah. Pada zona ini sampah dipilah*

berdasarkan jenis-jenisnya yaitu sampah kaca atau beling, lapak keras, lapak kertas, lapak plastik, limbah nasi, serta pemilihan kompos dan residu". Setelah melalui proses pemilahan di Zona 1, sampah akan dikumpulkan sesuai dengan jenisnya dan dilakukan pengepakan pada setiap lapak siap jual di Zona 2 Sampah-sampah tersebut terutama yang berupa sampah anorganik dilakukan pengepakan agar bisa dijual kembali sedangkan untuk residu diangkut kembali untuk dikirimkan ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA).

Selain menghasilkan sampah daur ulang yang bisa dijual kembali, TPST ini juga mengolah sampah organik yang bisa diolah menjadi pupuk kompos dan pakan ternak. Sampah organik yang bisa diolah menjadi pupuk kompos dilakukan pengolahannya di Zona 3, sedangkan sampah organik yang berupa sisa limbah makanan diolah menjadi pakan ternak baik untuk peternakan di lingkungan TPST sendiri maupun dijual untuk peternakan yang ada di luar TPST. Pada pengolahan pupuk kompos di Zona 3, sampah dicampur dengan kotoran hewan ternak yang diambil dari peternakan yang berada di Zona 4. Pak Tukiran yang mengelola perkomposan mengatakan "*di zona 4 Pengolahan sampah dengan pengomposan merupakan cara penumpukan sampah pada lubang kecil dalam jangka waktu tertentu*". Untuk menghasilkan pupuk yang alamiah atau proses dekomposisi yang dilakukan oleh mikroorganisme terhadap buangan organik yang *biodegradable*. Di zona 4 ini juga terdapat kandang kambing yang mana limbah kotoran kambing di jadikan sebagai tambahan dan campuran dalam proses pengomposan sampah daun dan pupuk kompos.

Pupuk kompos yang sudah ditimbang dan dibungkus ke dalam karung akan dijual dengan harga Rp. 500,00/kg. Hasil dari penjualan pupuk kompos dan sampah daur ulang tersebut menjadi salah satu sumber pendapatan TPST untuk biaya operasional dan upah untuk pekerja. Selain TPST 3R Mulyoagung Bersatu bertujuan untuk mencapai program pengolahan sampah *zero waste*, TPST ini juga bertujuan untuk menanggulangi kemiskinan yang ada di Desa Mulyoagung. Sejak berdirinya TPST ini warga Desa Mulyoagung yang awalnya tidak memiliki pekerjaan menjadi pekerja di TPST, namun ada juga pekerja TPST yang berasal dari desa lain yang tidak jauh dari Desa Mulyoagung. Pak Supadi menjelaskan "*Untuk wilayah kerja pengoperasian pengambilan dan pengangkutan sampah sendiri TPST Mulyoagung beroperasi di beberapa wilayah diantaranya Mulyoagung 100%, Landung Sari 25%, Sumbersekar 90%, Kota Batu Kelurahan Dadaprejo 25%, dan UIN 100%*."

Manfaat dari pembangunan dan pengelolaan TPST Mulyoagung bersatu ini di antara lain adalah perbaikan lingkungan dan pengelolaan sampah yang mana di jelaskan oleh bapak Kusnoto dalam wawancaranya beliau mengatakan "*dahulu pembuangan sampah di buang di daerah aliran sungai brantas yang berlokasi di UIN Pasca Sarjana , tetapi karena mendapat teguran dari pemerintah kota akhirnya ada usulan untuk dibentuknya TPST di Mulyoagung*"

Manfaat Adanya Co-Management

Manfaat adanya *co-management* menurut Wiyanto (2004) dalam Bambang (2006:28) akan terwujud bila selaras dengan proses dan tujuannya, yaitu: 1) Untuk pengembangan ekonomi dan sosial yang bertumpu pada prakarsa dan kemampuan masyarakat. 2) Untuk mengalihkan kewenangan dalam menetapkan keputusan pengelolaan sumber daya alam. 3) Sebagai cara untuk mengurangi terjadinya perselisihan melalui keikutsertaan seluruh pihak yang terlibat secara demokratis. Pemanfaat sumber daya menerima manfaat dengan ikut serta dalam menetapkan keputusan dalam pengelolaan yang mempengaruhi kesejahteraan mereka, sedangkan pemerintah menerima

manfaat dari berkurangnya kewenangan. Pemerintah juga akan menetapkan hak dan kewenangan atas hukum yang setara dan mengalihkan sebagian kewenangannya.

Peran Serta Stakeholders

Peran *stakeholder* dalam pengelolaan lingkungan hidup dipertegas dalam pasal 9 ayat 2 UU No. 23/1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup yang menyebutkan bahwa pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan secara terpadu oleh instansi pemerintah, masyarakat dan pelaku pembangunan. Kerjasama antar *stakeholder* merupakan suatu jalinan berbagai pihak/actor (terkait dengan pengelolaan lingkungan yaitu: unsur pemerintah, swasta dan masyarakat) dalam mewujudkan menempatkan diri sesuai dengan fungsi dan kemampuannya dalam system kerjasama. Terdapat beberapa strategi pendekatan dalam partisipasi dan kemitraan menurut Schubeler (1966) dalam Bambang (2006) antara lain:

Community-based Approach (partisipasi masyarakat) Konsep ini menjelaskan bahwa masyarakat sebagai pihak yang terlibat langsung dalam manajemen proyek, sedangkan swasta dan pemerintah turut berpartisipasi tidak langsung (memberikan support/dorongan). Peran pemerintah juga mengkoordinasikan/ membantu dalam konsultasi. Basis strateginya dari kelompok masyarakat itu sendiri.

Peran Pemerintah dalam Co-Management

Peran Pemerintah dalam co-management sangat besar sekali menurut Wiyanto (Pemberdayaan Masyarakat Pasca Proyek, 2004), bahwa peran tersebut antara lain: 1) menyediakan peraturan/kebijakan seperti desentralisasi kekuasaan/ kewenangan; 2) Mendorong keikutsertaan dan melakukan dialog dengan masyarakat; 3) Mengakui/mengesahkan hak-hak masyarakat; 4) Melakukan prakarsa; 5) Melakukan penegakan hukum; 6) Mengatasi masalah yang berada di luar kewenangan masyarakat; 7) Memadukan kegiatan pada berbagai tingkatan pemerintah; 8) Menyediakan bantuan dan layanan teknis, administrasi dan keuangan untuk menunjang lembaga kemasyarakatan setempat. Pengelolaan *co-management* mensyaratkan adanya kelompok pemangku kepentingan untuk bersama-sama berbagi peran dalam pengelolaan.

SIMPULAN DAN SARAN

meskipun *Co-Management* diyakini sebagai model pengelolaan yang ideal bagi pengelolaan sampah yang mampu mengurangi biaya dan resiko, inefisiensi dan pencegahan konflik di masyarakat, tetapi masih sering ditemui kelemahan didalamnya yaitu perihal jejaring sosial yang belum berperan secara efektif. Namun penggunaan model pengelolaan berbasis *co-management* yang ditemukan di TPST Mulyoagung bersatu ini dianggap telah menjadi solusi atau jalan keluar yang dibutuhkan untuk menangani masalah pengelolaan dan pemanfaatan sampah dengan berdasarkan asas kerja sama. Pada level desa, meliputi: Kepala Desa, Sekretaris desa, LPMD, Ketua BPD, Ketua dan Ketua Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM). Sementara itu, dari level kota terdapat, Kantor Lingkungan Hidup, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, NGO (*Non Governmental Organization*) yang bergerak pada isu lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA

- Apsari, Annisa Dwi dan kawan-kawan, 2016, perubahan sosial masyarakat desa Mulyoagung akibat pembangunan Berwawasan Lingkungan Melalui Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu, *Jurnal Ilmu Sosial UNNES* , Vol.43 No.3
- Hanif, Hasrul, 2008, Mengembalikan Daulat Warga Pesisir, Partisipasi, Representasi dan Demokrasi di Aras Lokal, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hernawati,Devi.Saleh,Choirul.Suwondo,2013 , Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah Berbasis 3R (Reduce,Reuse Dan Recycle) (Studi Pada Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu Di Desa Mulyoagung Kecamatan Kabupaten Malang).*Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Vol 1(2) 181-187
- Ichrom,Yulia Nurul DKK , 2015 , Manajemen Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu Berbasis Masyarakat . *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Vol.13 (1) 35-41
- Indrawasih,Ratna, 2008, *Co-management* Sumberdaya Laut Pelajaran dari Pengelolaan Model *Co-Fish* Kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat.*J.Bijak dan Riset Sosek KP*.Vol.3 No.2.
- Nadisa, M., Sudarsana, D.K., Yasmara, I.N. 2009.*Manajemen Pengangkutan Sampah Di Kota Amlapura*. *Jurnal Ilmiah Teknik Sipil*, 13 (2): 120-135
- Saputra,Boy Shandi.Srihardjo,Nanang Bagus, 2018 , Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah Di TPST 3R-Desa Mulyo Agung.*Junal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*.Vol 7(3)
- Sekhar, Udaya Nagothu, 2006, Social Capital and Fisheries Management: The Case of Chilika Lake, India, *Environment Management* (2007) 39: 497-505.
- Susilo, Rachmad K Dwi, 2010, *Co-management* Air Minum untuk Kesejahteraan Masyarakat Sekitar, Yogyakarta: Samudra Biru
- Susilo, Rachmad K Dwi, 2017, Praktik Pembelajaran Sosial Pada *Co-Management* Air Minum Masyarakat Sekitar Sumber Air. *The Journal of Society & Media*, Vol. 1(1) 67 – 83
- Sutomo, 2011 , Pemilihan Model *Co-Management* Pengelolaan Perikanan Tangkap. *Jurnal Teknologi Perikanan dan Kelautan*, Vol. 2(1) 61-70
- Sutomo, 2012 , Pola Implementasi *Co-mangement* Perikanan Tangkap Di Palabuhanratu.Vol 20(1) 61-70.